

Judul : Genjot kepesertaan BPJS, pekerja formal butuh perlindungan sosial
Tanggal : Minggu, 03 September 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Genjot Kepesertaan BPJS Pekerja Formal Butuh Perlindungan Sosial

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengapresiasi meningkatnya kepesertaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Data dua tahun lalu, keikutsertaan masih rendah, namun hari ini sudah masuk tujuh besar dari daerah lainnya.

"Saya rasa ini sebuah apresiasi yang harus kita berikan atas pencapaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus meningkatkan keikutsertaan BP Jamsostek. Kepesertaan sangat penting guna memberikan perlindungan jaminan sosial kepada teman-teman pekerja, baik yang formal maupun yang informal," ucap Kurniasih di Bangka Belitung, Jumat (1/9).

Dia menekankan perlunya kontribusi serta dorongan yang kuat terhadap para pekerja di Indonesia agar dapat mengikuti keikutsertaan BP Jamsostek guna mencapai target capaian nasional yakni delapan puluh persen. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama serta kerja keras bagi semua pihak, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah guna dapat memenuhi target capaian nasional.

"Kita akan mendorong peningkatan dari sisi regulasinya. Di sisi lain perlu juga adanya program untuk yang masyarakat berusia tujuh puluhan, serta perlindungan teman-teman pekerja tambang yang perlu perlindungan lebih besar lagi," ucapnya.

Pemprov Babel merupakan penghasil timah yang besar dan

juga penghasil laut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini mampu untuk terus mendorong peningkatan kepesertaan dari BP Jamsostek bagi para pegawai yang ada di wilayah tersebut. Sehingga bisa mencapai target pemerintah," tuturnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Per Februari 2022, dari jumlah penduduk Babel sebanyak 1,49 juta, 730.972 orang yang bekerja dari total angkatan kerja sebanyak 767.603. Berdasarkan data *coverage* tenaga kerja yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Bangka Belitung baru sebesar 31,42 persen dengan target nasional sebesar 80 persen.

Perlindungan jaminan sosial ini tentunya bukan menjadi pekerjaan pemerintah pusat saja, namun juga pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah berupa penganggaran atau pengalokasian anggaran daerah bagi jaminan sosial pekerja di lingkungan pemerintahan daerah, termasuk pekerja rentan.

Sementara, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene meminta agar pemerintah lebih masif lagi dalam melakukan sosialisasi manfaat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Karena berdasarkan data baru 30 persen dari total pekerja formal yang terdata.

"Sosialisasi dari pemerintah harus masif agar mereka dapat ikut serta dan mendapatkan perlindungan. Minimal dua program yang mereka miliki yaitu program kecelakaan kerja dan program kematian, ini kecil biayanya akan tetapi kurang sosialisasinya," ujarnya. ■ KAL